

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Fokus dari penelitian ini adalah terkait dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk strategi pencegahan kriminalisasi guru pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung. Simpulan diuraikan dalam bentuk intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah upaya ataupun strategi untuk mencegah terjadinya tindak kriminalisasi terhadap guru pada lingkungan sekolah. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengajarkan, memahami dan mengatasi peristiwa kriminalisasi guru ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti strategi pembelajaran yang digunakan, kurikulum, kualitas dan kapabilitas pengajaran guru, serta dukungan dari sekolah serta pihak luar yang dalam hal ini pemerintah dan orang tua. Tertanamnya nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghargai hak dan kewajiban setiap manusia adalah hal yang utama dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yakni *smart and good citizens*. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan bimbingan, umpan balik yang konstruktif, dan menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan. Apabila pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diaplikasikan secara relevan, maka dapat membantu siswa memahami kompleksitas permasalahan yang terjadi di sekolah dan mempromosikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan toleransi, dan pemahaman akan pentingnya saling menghargai antara hak dan kewajiban setiap orang.

##### **5.1.2 Simpulan Khusus**

Setelah peneliti melakukan penelitian dan kajian yang mendalam mengenai peran Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk strategi pencegahan kriminalisasi guru pada lingkungan sekolah menengah atas di kota Bandung, peneliti akan memaparkan beberapa simpulan khusus yang disusun berdasarkan

rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut merupakan simpulan khusus yang dimaksud:

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang efektif dalam mengenalkan, membelajarkan, serta memahami terkait kriminalisasi terhadap guru pada lingkungan sekolah. Terdapat strategi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memberikan pemahaman mengenai kriminalisasi guru kepada siswa. Dalam hal ini guru Pendidikan Kewarganegaraan melakukan berbagai cara seperti halnya menyisipkan materi terkait kriminalisasi guru ini kedalam materi-materi yang relevan dengan materi yang terdapat dalam kurikulum seperti halnya memasukkannya kedalam materi, hak dan kewajiban, hak asasi manusia, norma hukum yang berlaku serta hukum positif yang berlaku atau cara ini disebut sebagai *hidden curriculum*. Adapun metode pembelajaran yang bervariasi serta kreatifpun dilakukan untuk mempermudah pemahaman para siswa dalam memahami materi terkait kriminalisasi guru ini, seperti metode ceramah, diskusi kelompok, dan bermain peran atau *role playing*.
2. Dalam implementasi strategi Pendidikan Kewarganegaraan yang menyisipkan materi mengenai kriminalisasi terhadap guru dalam kurikulum (*hidden curriculum*) menunjukkan dampak yang positif dan diterima dengan baik oleh siswa di sekolah. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban serta norma hukum yang berlaku, tetapi juga memahami konteks sosial dan pendidikan yang melatarbelakangi isu kriminalisasi guru. Metode pembelajaran yang bervariasi dan kreatif, seperti ceramah, diskusi kelompok, dan permainan peran, berhasil menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menarik, sehingga siswa dapat dengan mudah meresapi materi yang disampaikan. Dengan demikian, penerapan *hidden curriculum* dalam Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi efektif untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu keadilan sosial, serta mendorong mereka untuk lebih berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kewarganegaraan dapat dibangun dengan pendekatan yang relevan dan adaptif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan posisi guru dan

pemahaman siswa tentang kompleksitas hubungan antara pendidikan, hukum, dan hak asasi manusia.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencegahan kriminalisasi guru di lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung menunjukkan bahwa baik faktor internal maupun eksternal memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Faktor internal, seperti kualitas dan kapabilitas guru, serta metode mengajar yang diterapkan, sangat mempengaruhi kemampuan guru untuk menyampaikan materi dengan efektif dan menarik, sehingga siswa dapat memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung dan melindungi lingkungan pendidikan yang sehat. Selain itu, karakter dan sikap siswa juga merupakan elemen penting yang berkontribusi besar terhadap penerimaan materi, di mana keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kesadaran mereka akan isu-isu seputar kriminalisasi guru. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kurikulum yang relevan, dukungan serta kebijakan yang jelas dari sekolah memiliki pengaruh besar yang berdampak terhadap guru dan siswa, dan hal yang paling utama adalah keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran, menjadi landasan penting yang memperkuat efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Dengan integrasi kedua kelompok faktor tersebut, diharapkan program pendidikan kewarganegaraan mampu secara signifikan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap guru, serta membangun kesadaran hukum dan moral yang lebih baik di kalangan siswa.
4. Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung memiliki implikasi yang signifikan terhadap pencegahan kriminalisasi guru, dengan dampak positif yang jelas bagi siswa. Pendidikan Kewarganegaraan berperan tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai alat pembentukan karakter dan kesadaran hukum di antara siswa, yang dapat berkontribusi pada pengurangan stigma negatif terhadap guru. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga mendorong penghargaan terhadap

peran guru sebagai pendidik yang patut dihormati. Melalui metode pembelajaran yang variatif dan kreatif, seperti diskusi, permainan peran, dan pengajaran kontekstual, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial yang tinggi, yang pada gilirannya menciptakan suasana sekolah yang aman dan mendukung. Hasilnya, siswa tidak hanya menjadi lebih peka terhadap isu-isu keadilan dan hak asasi manusia tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, sehingga pembelajaran Kewarganegaraan berkontribusi secara efektif dalam mencegah tindakan kriminalisasi terhadap guru dan membangun masyarakat yang lebih beradab di Kota Bandung.

## 5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung dalam konteks pencegahan kriminalisasi terhadap guru sangat signifikan dan multifaset. Dengan strategi penyisipan materi yang relevan terkait kriminalisasi ke dalam kurikulum melalui pendekatan *hidden curriculum*, siswa tidak hanya menerima pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka, tetapi juga mendapat pemahaman kontekstual mengenai isu-isu sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Metodologi pembelajaran yang variatif, seperti ceramah, diskusi kelompok, dan permainan peran, menciptakan suasana akademik yang interaktif dan menarik, yang secara efektif meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Selain itu, faktor internal, seperti kemampuan dan kreativitas guru dalam menyampaikan materi, serta karakter siswa yang aktif, berkontribusi terhadap penerimaan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga lingkungan pendidikan yang sehat. Di sisi lain, dukungan eksternal berupa kebijakan sekolah yang mendukung dan keterlibatan orang tua menjadi landasan penting dalam memperkuat efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Melalui integrasi aspek-aspek tersebut, diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mampu mencegah kriminalisasi terhadap guru, tetapi juga membentuk generasi yang lebih sadar, responsif, dan bertanggung jawab terhadap isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dengan demikian, peran pendidikan dalam membangun masyarakat

yang lebih beradab dan menghormati posisi guru sebagai pendidik turut diperkuat dalam konteks ini.

### **1.5.1 Implikasi Teoritis**

Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pencegahan kriminalisasi terhadap guru mencerminkan pergeseran paradigma pendidikan yang lebih holistik dalam membangun karakter dan kesadaran hukum siswa. PKn berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Dengan menyisipkan isu kriminalisasi guru melalui hidden curriculum, siswa diharapkan memahami hak dan kewajiban mereka, serta menyadari pentingnya melindungi posisi guru. Metode interaktif, seperti diskusi kelompok dan permainan peran, memungkinkan siswa mengembangkan berpikir kritis dan empati, keterampilan yang krusial dalam menghadapi tantangan sosial. Oleh karena itu, PKn berperan sebagai strategi pendidikan yang mengedepankan pembentukan individu cerdas dan komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Implikasi ini menunjukkan perlunya pendidikan modern untuk beradaptasi dengan dinamika sosial, menghasilkan generasi yang peka terhadap isu-isu keadilan dan hak asasi manusia.

### **1.5.2 Implikasi Praktis**

Hasil dari penelitian terkait penerapan Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencegahan kriminalisasi terhadap guru sangat signifikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan suportif, diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan karakter siswa yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung. Dengan menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan yang terintegrasi dan menyisipkan materi tentang kriminalisasi terhadap guru, diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keadilan yang akan mendorong mereka untuk melindungi dan menghargai peran guru dalam proses belajar mengajar. Selain itu, metode pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi, permainan peran, dan kolaborasi dengan orang tua serta komunitas, dapat

memperkuat keterlibatan siswa dan menumbuhkan sikap empati terhadap isu-isu sosial. Ke depannya, penerapan PKn yang efektif diharapkan dapat mengurangi insiden kriminalisasi guru dan membangun generasi yang lebih peka terhadap keadilan serta hak asasi manusia, sehingga pendidikan di Indonesia tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademis tetapi juga bertanggung jawab dan beretika dalam berkontribusi kepada masyarakat.

### 5.3 Saran

Pada sub bab rekomendasi ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bentuk Strategi Pencegahan Kriminalisasi Guru Pada Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung” yang diharapkan menjadi pengingat ataupun perbaikan serta bisa menjadi referensi untuk ke depannya bagi setiap pihak. Rekomendasi tersebut ialah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Siswa

Diharapkan siswa aktif berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan meningkatkan kesadaran dan meningkatkan motivasi belajar untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta karakter dalam menghargai peran guru. Melibatkan diri dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran yang interaktif dapat membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka, serta memperkuat empati dan juga toleransi terhadap guru sebagai pendidik dan juga rasa saling menghargai dan menghormati terhadap sesama.

#### 2. Bagi Guru

Guru diharapkan untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan mereka melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Mereka harus kreatif dalam mengimplementasikan metode pengajaran yang interaktif dan relevan, yang dapat membantu siswa menyerap nilai-nilai positif serta memahami isu-isu seputar kriminalisasi terhadap guru.

#### 3. Bagi Satuan Pendidikan

Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif. Dengan menumbuhkan budaya sekolah yang positif, diharapkan siswa, guru, dan staf mendukung satu sama

lain dalam menciptakan atmosfir pendidikan yang aman dan inklusif, serta memperkuat kerjasama antara semua pemangku kepentingan.

4. Bagi Organisasi Profesi

Organisasi guru dan profesi pendidikan harus memainkan peran aktif dalam mengadvokasi perlindungan guru dari kriminalisasi. Ini bisa meliputi pengembangan pedoman etika dan hukum, serta mendukung program pelatihan dan seminar bagi guru mengenai hak mereka dan cara menangani situasi konflik yang mungkin muncul.

5. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah meningkatkan regulasi yang mendukung perlindungan guru dalam menjalankan tugas pendidikan mereka. Penyusunan kebijakan yang jelas terkait hak dan kewajiban guru dalam konteks hukum juga sangat penting untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap profesi ini. Kemudian mampu di implementasikan dalam bentuk pembaharuan Hukum Pendidikan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

6. Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Diharapkan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam pengembangan metode pembelajaran. Nilai-nilai yang terkandung dalam substansi yang terdapat dapat dalam peristiwa kriminalisasi guru dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran karakter dan pembelajaran pendidikan hukum dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat diperkuat dengan pendekatan proyek atau aksi nyata yang berfokus pada penguatan karakter dan pengenalan hukum positif yang berlaku, sehingga siswa tidak hanya memahami nilai nilai kewarganegaraan secara teoritis saja, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

7. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pendidikan kewarganegaraan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai posisi guru, serta

dukungan terhadap inisiatif pendidikan yang mendorong kesadaran hukum dan etika, akan sangat membantu dalam memperbaiki hubungan antara guru dan komunitas.

#### 8. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti diharapkan untuk menggali lebih dalam mengenai efektivitas berbagai metode pengajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan serta dampaknya terhadap pencegahan kriminalisasi terhadap guru. Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PKn di sekolah, serta cara-cara inovatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak asasi manusia.